

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan daerah otonom yang memiliki wewenang untuk mengelola dan meningkatkan potensi serta sumber daya di daerahnya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan ini dapat diketahui melalui analisa keuangan, salah satunya dari analisa kontribusi PAD dan dana perimbangan bagi daerah.

Berdasarkan analisa kontribusi dari data Laporan realisasi anggaran (LRA) 2015-2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dikategorikan sebagai daerah yang belum mampu menciptakan keseimbangan kontribusi antara sumber-sumber pendapatan di daerahnya. PAD mampu memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah sebesar 20%-30%, sementara dana perimbangan mampu memberikan kontribusi sebesar 70%-80%. Prosentase kontribusi antara keduanya berpengaruh pada kinerja daerah (kemandirian serta efisiensi pengelolaan keuangan). Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai pelaksanaan otonomi daerah yang partisipatif, artinya belum mampu secara aktif dan bebas untuk melakukan optimalisasi potensi dan sumber daya daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penyebab ketidakseimbangan kontribusi PAD dan dana perimbangan antara lain: (1) Target penerimaan daerah di beberapa sektor tidak terpenuhi (2) Alokasi untuk gaji pegawai (PNS) tidak bisa direlokasi, anggaran sangat besar. Pemerintah daerah mengakui hal tersebut menjadi penyebab besar dana

perimbangan menjadi tinggi, sementara kurangnya upgrade daerah untuk mampu mengejar anggaran besar ini melalui PAD (3) Laba dari perusahaan daerah kecil, dan penyertaan modal hanya ada pada satu perusahaan swasta (4) Ketidapatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta retribusi turut mempengaruhi jumlah PAD (5) Kurangnya inovasi dalam perencanaan serta pembangunan sektor sektor daerah, sementara pemerintah daerah memiliki potensi tinggi untuk berkembang pada sektor seni, budaya, dan pariwisata.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

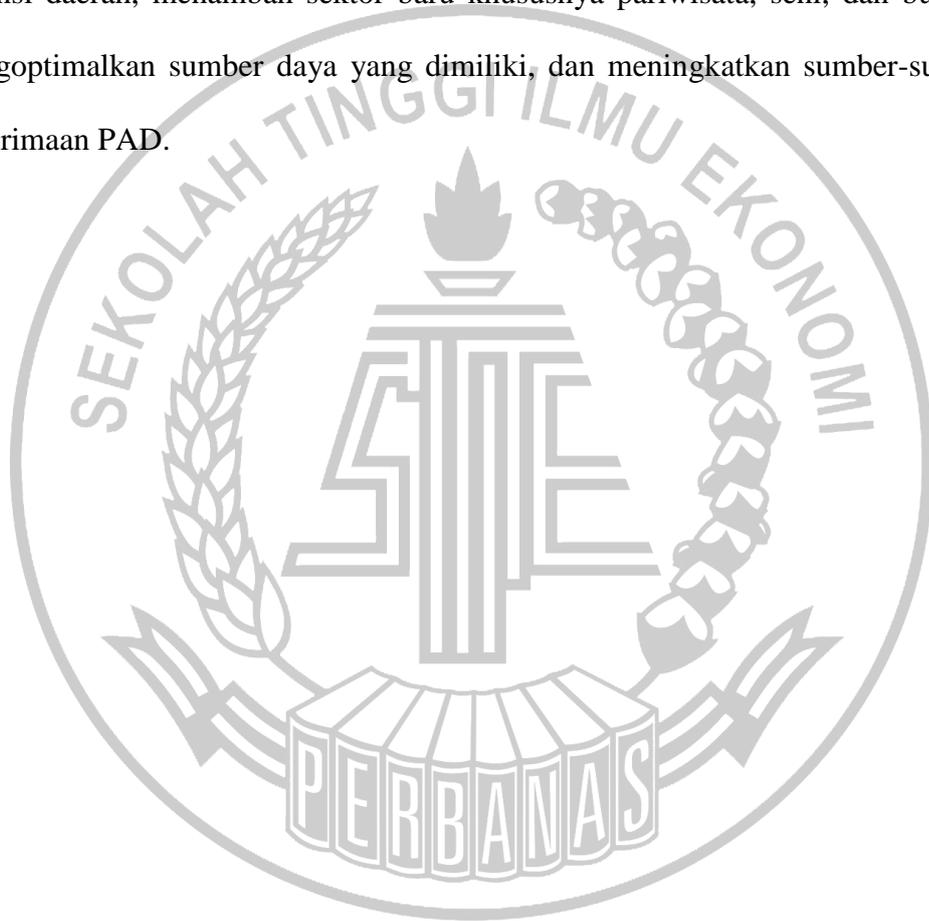
5.2.1 Saran

Saran yang didapat diambil dari pembahasan tugas akhir ini dengan topik “Evaluasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto” bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama diharapkan untuk menganalisa lebih lanjut terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD di BAPENDA Kabupaten Mojokerto. Adapun apabila melakukan penelitian di tempat yang sama, yaitu di BPKAD Kabupaten Mojokerto diharapkan untuk mengambil topik yang berbeda. Sehingga bisa menambah referensi untuk penelitian-penelitian sendiri.

5.2.2 Implikasi

Implikasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kontribusi PAD pada pemerintah daerah, yaitu dengan menetapkan

kembali target penerimaan sesuai dengan analisa peluang yang tepat, mengusahakan tercapainya realisasi target penerimaan, mengoptimalkan sektor sektor yang telah ada, adanya upaya untuk menambah infrastruktur dan perusahaan daerah akan semakin bagus. Jika membuat kebijakan, maka kebijakan-kebijakan yang akan diambil tersebut harus bertujuan untuk menggali potensi daerah, menambah sektor baru khususnya pariwisata, seni, dan budaya, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cicilia, V. S. (2015). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara*. *E-Journal Unsrat*, 7-9.
- Putri, Ismiranti Mersita (2016). *Anaisis Efisiensi, Efektifitas, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Tahun 2019-2014*. (Naskah Publikasi, Universitas Surakarta, Indonesia).
- Dhia wenny, C. (2012). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*.
- Pemerintah Indonesia. (2005). *PSAP No. 1 dan 2 PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Pengertian Pendapatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Provinsi Jatim. (2019). *Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. (2015-2019). *Laporan Realisasi Anggaran Tahunan*. Mojokerto: BPKAD.